



PERAN KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT INTEGRASI DI INDONESIA

Marisi Inrina Siahaan

marisiinrina@gmail.com

Viona Elisa Sinambela

vionaelisasinambela@gmail.com

Halimah Tusya'diah Lubis

halimahtusyadiah649@gmail.com

Windy Amanda Purba

windyamandapurba06@gmail.com

Dewi Sari Arta Nababan

sariarta2233@gmail.com

Suci Khayla

sucikhayla0820@gmail.com

Cindi Veronika Tamba

cindiveronica30@gmail.com

Universitas Negeri Medan (UNIMED)

ABSTRACT: *The constitution plays an important role in strengthening Indonesia's national integration. As the basic law of the state, the constitution establishes fundamental principles that unite the diverse nation. Some of the key roles of the constitution in promoting integration include: Affirming a shared national identity through Pancasila as the foundation of the state. Guaranteeing equal rights and obligations of all citizens without discrimination. Recognizing the diversity of ethnicities, religions, and cultures as national wealth. Establishing a system of government that balances central and regional power. Providing a legal framework for peaceful conflict resolution. Protecting the rights of minority groups and indigenous peoples. And promoting equitable development throughout Indonesia. With these roles, the Indonesian constitution is an important foundation for national unity amidst diversity. However, the implementation of constitutional values in national life still requires ongoing efforts from all elements of society.*

Keywords : *Constitution, National Integration, Basic Law, Pancasila, Equality, Diversity, Government System, Conflict Resolution, Minority Rights, Equitable Development, Unity.*

ABSTRAK: *Konstitusi memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi nasional Indonesia. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang menyatukan bangsa yang beragam. Beberapa peran kunci konstitusi dalam mendorong integrasi meliputi beberapa hal diantaranya Menegaskan identitas nasional bersama melalui Pancasila sebagai dasar negara. Menjamin kesetaraan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa diskriminasi. Mengakui keberagaman suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan nasional. Menetapkan sistem pemerintahan yang menyeimbangkan kekuasaan pusat dan daerah. Memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian konflik secara damai. Melindungi hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat adat. Serta mempromosikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan peran-peran tersebut, konstitusi Indonesia menjadi landasan penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Namun, implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bernegara masih memerlukan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat.*

Kata kunci : *Konstitusi, Integrasi Nasional, Hukum Dasar, Pancasila, Kesetaraan, Keberagaman, Sistem Pemerintahan, Penyelesaian Konflik, Hak Minoritas, Pembangunan Merata, Persatuan.*

LATAR BELAKANG

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dimana Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat integrasi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang dapat mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan. Konstitusi, dalam hal

ini UUD 1945, berfungsi sebagai landasan utama dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Pertama, konstitusi menetapkan dasar-dasar negara, termasuk ideologi Pancasila yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial. Dengan adanya Pancasila sebagai panduan, masyarakat Indonesia diajak untuk hidup berdampingan meski memiliki perbedaan. Ini memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas. Kedua, konstitusi mengatur sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Hal ini memungkinkan seluruh daerah, baik yang berada di pusat maupun di pinggiran, memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan, sehingga tidak ada daerah yang merasa terpinggirkan. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah munculnya gerakan separatisme.

Selain itu, konstitusi menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Jaminan hak-hak ini memperkuat kohesi sosial dengan memastikan bahwa semua kelompok, terlepas dari latar belakang mereka, merasa diakui dan dilindungi oleh negara. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu.

KAJIAN TEORITIS

Integrasi nasional adalah hal yang diperlukan suatu bangsa. Integrasi sendiri merupakan pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi juga berarti penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Sementara nasional memiliki arti yakni bersifat kebangsaan, berkenaan, berasal, atau meliputi suatu bangsa. Pengertian integrasi nasional sering kali dikaitkan dengan sesuatu yang mencerminkan keadaan penuh rasa kesatuan antara bagian atau unsur yang satu dengan unsur lainnya.

Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *integrate* yang berarti menyatupadankan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sementara kata nasional berasal dari bahasa Inggris yakni *nation* yang artinya bangsa. Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

James J. Coleman Integrasi adalah keserasian antar unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi secara relatif sesuai tanpa memunculkan pertentangan yang berarti.

Durkheim Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan pola kehidupan yang serasi.

Myron Weiner (1971) dalam Ditjendikti, 2012:178 memberikan lima definisi mengenai integrasi, yaitu:

1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang dipenintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

K.C. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Beliau membagi konstitusi menjadi dua bagian yaitu konstitusi yang semata-mata berbicara mengenai naskah hukum sebagai ketentuan dalam mengatur "the rule of the constitution", dan konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi mencantumkan ideologi, aspirasi serta cita-cita politik, the statement of idea, pengakuan kepercayaan suatu beloofsbelijdenis dari bangsa yang menciptakan nya (Pasha, 2002:69).

Herman Finer Konstitusi adalah anatomi (anatomi yang dimaksud adalah struktur peraturan pemerintahan termasuk kedalam bentuk dan susunan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan) kekuasaan politik yang dituangkan dalam aturan-aturan hukum. Yang mencakup :

1. Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
2. Die verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Die geschreiben verfassung. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Kusnardi & Ibrahim, 1988:65).

C.F. Strong Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. fungsi konstitusi adalah Memberikan batas kewenangan tindakan pemerintah, dapat Menjamin hak-hak yang diperintah, serta melakukan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Jimly Asshiddiqie (2005) Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep konstitusi tercakup dalam peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan serta kedudukan organ-organ negara dan mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang penulis gunakan dalam pembuatan jurnal, yang kedua penulis memperhatikan Literatur Sekunder yang diperoleh dari Buku dan Artikel Akademik Karya-karya yang telah membahas peran konstitusi dalam aspek integrasi, baik dari perspektif sejarah, sosial, maupun hukum. Serta Jurnal-jurnal hukum yang relevan mengenai konstitusionalisme, integrasi nasional, dan dinamika politik di Indonesia.

Kemudian bahan yang kedua penulis memperhatikan Dokumen Hukum UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945): Sebagai sumber utama, UUD 1945 akan dikaji secara mendalam karena menjadi kerangka konstitusional yang mengatur kesatuan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan UUD 1945: Empat kali amandemen UUD 1945 yang menambah atau merubah sejumlah ketentuan mengenai sistem pemerintahan, otonomi daerah, dan hak asasi manusia juga harus menjadi bahan penting.

Metode

Metode pengambilan data dilakukan dengan Analisis teks, Teks-teks yang ada dalam UUD 1945, undang-undang lainnya, serta literatur sekunder yang dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi peran dan pengaruh konstitusi terhadap integrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hakikat Integrasi Nasional dari Kearifan lokal di masyarakat

Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, dan etnis dalam suatu negara sehingga tercipta harmoni dan persatuan nasional. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, integrasi nasional adalah tantangan yang terus-menerus dihadapi.

Kunci sukses integrasi nasional di Indonesia adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta upaya terus-menerus untuk menemukan kesamaan yang bisa mengikat seluruh elemen masyarakat. Slogan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu,” mencerminkan semangat integrasi nasional yang menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai pemicu konflik.

1. Peran Kearifan Lokal dalam Identitas dan Integrasi Nasional

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam integrasi nasional karena ia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam satu kesatuan nasional. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi adalah contoh bagaimana kearifan lokal dapat memfasilitasi integrasi sosial di tengah-tengah perbedaan.

Kearifan lokal berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencapai integrasi nasional. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, toleransi, dan solidaritas, yang merupakan bagian dari kearifan lokal berbagai suku bangsa di Indonesia, dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui penguatan kearifan lokal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, di mana perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sumber kekayaan dan kekuatan bersama.

2. Pembangunan Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal

Pembangunan karakter bangsa yang berbasis kearifan lokal menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini meliputi:

- Pendidikan Karakter di Sekolah Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai lokal, siswa dapat memahami dan menghayati pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
- Penguatan Komunitas Melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mengedepankan kearifan lokal. Misalnya, kegiatan gotong royong, festival budaya, dan ritual adat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat.
- Penerapan Nilai dalam Kehidupan Sehari-hari Mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali dan menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam cara berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan menjaga lingkungan.

Konstitusi dan kedudukannya

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bemegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai :

1. Konstitusi sebagai hukum dasar, karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.
2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-aturan yang lain harus sesuai dengan undang-undang dasar.

Isi dari Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Fungsi Konstitusi, Menetapkan Struktur Pemerintahan Konstitusi menentukan bentuk dan struktur pemerintahan, seperti pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melindungi Hak Asasi Manusia Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum. Menjadi Landasan Hukum Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di negara tersebut, yang menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Menjaga Stabilitas Politik Konstitusi membantu menjaga stabilitas politik dan sosial dengan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa dan konflik.

Isi Konstitusi

Pembukaan: Mengandung prinsip-prinsip dasar, tujuan negara, dan pandangan filosofis tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Batang Tubuh: Mengatur struktur pemerintahan, kekuasaan lembaga-lembaga negara, serta proses-proses dalam penyelenggaraan negara.

Penjelasan: Menyediakan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai isi konstitusi, meski bagian ini tidak selalu ada dalam setiap konstitusi.

Amandemen: Mengatur tentang proses perubahan atau amandemen konstitusi jika diperlukan untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Konstitusi merupakan fondasi utama yang memastikan keberlangsungan dan legitimasi sistem pemerintahan serta perlindungan hak-hak warga negara.

Amandemen atau perubahan UUD NRI 1945

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Antara bage perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli masih tetap ada. Kaitannya dengan masalah mengapa perlunya dilakukan amandemen UUD 1945 adalah karena kehidupan manusia yang senantiasa berubah, bak perubahan internal masyarakat, seperti pemikiran, kebutuhan hidup kemampuan din maupun kehidupan eksternal masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan msyarakat lain. Oleh karena itu konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.

Dikdik B. Arif (2014: 112-114) menjelaskan, dasar pemikiran dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain karena pertama. UUD 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) pada lembaga-lembaga kenegaraan Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat

Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah dominan eksekutif (*executive heavy*), yakni kekuasaan dominan di tangan Presiden Pada din Presiden terpusat kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional.

Ketiga. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (*multitafsir*) Misalnya pasal 7 UUD 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan lebih dan satu.

Keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang

Kelima, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah.

Dengan amandemen UUD 1945, lembaga MPR mengalami transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Kekuasaan MPR pun menjadi berkurang. MPR tidak lagi berwenang untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi rakyatlah yang sekarang berdaulat untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang sebelum diamandemen kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Pembagian kekuasaan juga diatur dengan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Hasil konstitusi dalam Memperkuat integrasi di Indonesia

Peran adalah fungsi, tugas, atau tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga dalam suatu sistem atau situasi tertentu. Peran juga mencakup tindakan atau kontribusi yang diharapkan dari individu atau pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks sosial, organisasi, atau masyarakat. Dalam konteks ini peran memiliki makna dalam memperkuat integrasi bagi negara Indonesia guna terciptanya suatu negara yang adil, berdaulat, makmur dan sejahtera.

Indonesia adalah suatu negara yang dikenal Sebagai negara hukum yang didalamnya diatur oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi sebagai hukum dasar dan tertinggi. Dimana Konstitusi memiliki peran dalam memperkuat integrasi yang ada di Indonesia. Peran konstitusi dapat dilihat dari adanya aturan perundang-undang yang mengikat peraturan dan tata tertib yang ada di Indonesia. Setiap peraturan yang telah ditetapkan sudah terikat dengan konstitusi.

- Konstitusi memperkuat integrasi dalam Landasan ideologis, UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, memberikan landasan ideologis yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Pancasila menjadi pedoman bersama yang mengikat seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau budaya.
- Pengakuan keberagaman Konstitusi mengakui dan melindungi keberagaman Indonesia melalui semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Hal ini mendorong rasa saling menghormati dan toleransi antar kelompok masyarakat.
- Sistem pemerintahan terpadu UUD mengatur sistem pemerintahan yang menyatukan berbagai daerah di bawah satu pemerintahan pusat. Sistem ini memastikan adanya koordinasi dan kerja sama antar daerah, sambil tetap memberikan otonomi daerah yang sesuai.
- Bahasa nasional Konstitusi menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Penggunaan bahasa yang sama memfasilitasi komunikasi antar daerah dan memperkuat rasa identitas nasional.

- Hak dan kewajiban warga negara, UUD 1945 menjamin hak-hak dasar dan menetapkan kewajiban-kewajiban warga negara secara setara. Kesetaraan ini mendorong rasa keadilan dan persatuan di antara warga negara.
- Sistem pendidikan nasional, Konstitusi mengamanatkan sistem pendidikan nasional yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Pendidikan nasional berperan dalam membentuk identitas nasional yang kuat.
- Pertahanan dan keamanan nasional UUD mengatur sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan seluruh warga negara. Konsep bela negara memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan integritas nasional.
- Ekonomi nasional konstitusi menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi yang inklusif ini membantu mengurangi kesenjangan dan memperkuat kohesi sosial. konstitusi berperan sebagai perekat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia, memperkuat rasa identitas nasional, dan memfasilitasi integrasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstitusi, terutama UUD 1945, bertindak sebagai landasan hukum tertinggi yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Ia menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan bersama bagi seluruh warga negara.
2. Pengakuan keberagaman dengan keberagaman Indonesia, konstitusi membantu melindungi dan menciptakan keseimbangan antara identitas nasional serta identitas lokal. Ini mendorong persatuan dalam keberagaman.
3. Konstitusi menyediakan struktur pemerintahan yang menyatukan berbagai daerah di bawah satu sistem nasional, sambil tetap memberikan ruang untuk otonomi daerah.
4. Konstitusi menjamin hak-hak dasar dan menetapkan kewajiban warga negara secara setara, konstitusi menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan yang penting untuk integrasi nasional.
5. Konstitusi sebagai Identitas nasional melalui penetapan bahasa nasional, simbol-simbol negara, dan sistem pendidikan nasional, konstitusi membantu membentuk dan memperkuat identitas nasional Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil dari penulisan jurnal, penulis ingin memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan:

Saran bagi penulis lain: Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan pemahaman mengenai konstitusi dalam Memperkuat integrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Osberth Sinaga, M.Si, Apiek Gandamana, S.Pd., M.Pd. Tim Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2024. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Medan : CV. Harapan Cerdas

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1742/pdf/4031>

<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5273/4701/8991>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk>

Makalah pendidikan kewarganegaraan kelompok 2 integrasi nasional dan konstitusi